

BAB IV

ERA KEMENANGAN POLITIK KAUM SARUNGAN

1. Belajar Dari Kemenangan dan Kegagalan Politik Gus Dur

Bisakah kaum santri menjadi presiden di negeri ini? Adalah pertanyaan yang menuntut jawaban secara representatif. Tidak mudah bagi tokoh Islam untuk menjadi pemimpin puncak di Indonesia. Bukan karena tidak berkualitas, atau karena tak layak dan berkemampuan. Dari segi kompetensi, mereka sangat pantas menjadi presiden, tapi kendalanya lebih karena beban kultural, selain beban struktural. Semacam takdir politik, selalu terjebak pada kungkungan sangkar-besi legitimasi. Kompetensi positif, namun legitimasi selalu negatif. Itulah beban politik kaum santri. Menurut Ben Anderson, kaum santri selalu mengalami kesulitan menemukan ruang politik untuk menjadi orang puncak di Indonesia. Jika tokoh santri itu ingin menjadi tokoh puncak bangsa, yang bersangkutan harus keluar kandang dari eksklusivitas umat Islam, kemudian masuk ke dunia luas yang plural.

Namun ketika sudah keluar dari eksklusivitas umat Islam, pada saat yang bersamaan santri itu dianggap lepas dari akar umat. Tidak lagi menjadi tokoh umat. Kosa kata, simbol, dan area pergaulannya pun tak lagi di lingkungan umat (baca: pesantren). Sebutlah menjadi 'murtad politik'. Padahal ketika konstruksi tokoh umat itu begitu kental, beban politiknya pun sangatlah berat karena akan masuk

variabel-variabel teologis dan ideologis yang super ketat. Bisa-bisa akan dijerat oleh perangkap norma-norma keagamaan yang ketat seperti dituding menjadi tokoh tahayul, bid'ah, dan khurafat.

Itulah takdir kultural politik kaum santri. Seperti tak mungkin dilahirkan untuk menjadi presiden atau tokoh utama di Republik yang mayoritas penduduknya Muslim terbesar di muka bumi ini. Anderson bahkan menunjuk Mohammad Natsir, dengan pernyataan: "*setinggi-tinggi Natsir terbang, masih tetap di bawah Soekarno dan Hatta*". Tak pernah menjadi tokoh puncak Indonesia, sebutlah menjadi *imamat al-'uzma*. Kendati ia sukses sebagai tokoh Islam utama, bahkan menjadi legenda politik umat Islam Indonesia.

Sejarah Indonesia pun akhirnya seperti milik kaum nasionalis. Kaum "Merah Putih". Kosa kata dan simbol nasionalis pun seperti baju politik kebangsaan, bukan milik kaum santri. Padahal, betapa sangat nasionalistiknya kaum santri itu, sangat cinta tanah air. Sejarah pun akhirnya melahirkan kategorisasi politik kaum nasionalis *versus* Islam. Tokoh nasionalis lawan tokoh Islam. Kini untuk merevisi kesalah-kaprahan tersebut kemudian muncul istilah 'nasionalis Islam' *versus* 'nasionalis sekular'. Tapi intinya, betapa sulit tokoh dan komunitas santri keluar dari dilema budaya dan struktur politik yang mengungkungnya di negeri ini.

Namun demikian, hal itu telah ditepis, ketika realitas Indonesia menginginkan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999. Satu realitas yang telah mematahkan konsepsi 'santri' ala Clifford Geertz yang mengatakan bahwa santri tidak dapat mengarungi medan politik apalagi bersejajar dengan kaum priyayi. Namun, santri yang menjadi Presiden tersebut memang dalam kondisi yang sangat pelik dan darurat serta membutuhkan manusia yang enerjik dalam menuntaskan krisis multi dimensi Indonesia. Sekalipun sebentar memimpin negara, kaum

santri telah dapat menciptakan sejarah baru yaitu menguasai seluruh birokrasi daerah baik tingkat I atau II.

Akankah Indonesia menghadirkan santri menjadi presiden untuk yang kedua kalinya setelah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)? Presiden bersejarah karena dipilih rakyat secara langsung. Jawabannya tentu tergantung rakyat Indonesia. Tapi, aroma pertarungan nasionalis versus Islam pun mulai merebak pula dengan suasana yang lebih mencair. Kesan yang muncul di publik, tokoh nasionalis sekular seperti di atas angin. Lebih-lebih dengan komposisi perolehan suara politik pemilu legislatif, yang didominasi oleh kekuatan nasionalis.

Ketika KH. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, ia telah membuktikan era kemenangan politik kaum santri. Bahkan, santri *par excellence*. Amien Rais adalah santri kaum modernis, terpilih sebagai Ketua MPR berkat restu politik Gus Dur; santri neo-modernis yang atas prakarsa politik Amien Rais pula, terpilih sebagai "Presiden Santri" RI. Inilah *track record* baru dari kemenangan politik kaum santri, yang selama ini selain *dikuyo-kuyo* (meminjam istilah C. Reksodikromo) "kaum abangan", juga terlanjur dipandang sebelah mata (kampungan, tradisional, dan mengalami marjinalisasi secara ekonomi dan politik). Kaum santri terlanjur dituduh oleh mantan tokoh PNI, Hadisoebono, sebagai "kaum sarungan", yang faktanya selama rezim Orde Baru, mengalami nasib tragis, dicampakkan dari arena politik. Akibatnya, energi kaum santri hanya terfokus di pesantren, pendidikan, dan urusan sosial-kemasyarakatan. Padahal, semua garapan itu, berada di bawah kendali (kebijakan) politik. Tragisnya lagi, kebijakan politik rezim abangan Orba tersebut, selalu memobilisasi massa santri demi kepentingan dan kekuasaan politik. Itulah intrik kejam rezim abangan Orba. Pesantren hanya digunakan lahan safari politik, kiai hanya dipakai sebagai *vote getter* dalam pemilu, sementara "kue politiknya" dilahap sendiri oleh penguasa bersama kroni-kroninya.

Tampilnya Gus Dur sebagai Presiden keempat RI, Amien Rais sebagai Ketua MPR, adalah *mega-prestasi* kaum santri *par excellence*, yang telah meruntuhkan semua mitos dan fakta, bahwa santri selalu berada di pinggir kekuasaan, dan karenanya tak boleh berkuasa. Siapa bilang santri tak boleh berpolitik, dan karenanya hanya menjadi *makmum* politik. Tampilnya Gus Dur bukan saja sebagai simbol kemenangan politik kaum santri, tetapi juga satu-satunya bukti, bahkan bukti awal bahwa lembaran sejarah baru politik Indonesia pernah dinakhodai oleh Presiden Santri KH Abdurrahman Wahid alias "Gus Dur".

a. *Gus Dur: Santri Neo-Modernis*

Gus Dur adalah gambaran sosok santri neo-modernis. Jika santri modernis kehilangan akar tradisinya, maka santri neo-modernis justru tidak sama sekali. Gus Dur sebagai sosok santri neo-modernis malah berpijak pada akar asalnya (tradisi pesantren, ulama, hukum Islam, dan al-Qur'an serta Hadis Nabi Saw) sembari merumuskan visi kemodernan. Betul, ia berlatar belakang NU yang «tradisional» tetapi jangan kaget jika ia pun dicatat sebagai pencetus ideologi toleransi yang liberal dan pluralis. Ia adalah tokoh lintas agama, yang akrab dalam tradisi pluralitas keagamaan.

Do'a bersama dan kerja sama antarumat beragama, merupakan tradisi spiritual Gus Dur yang amat liberal. Jika dilihat dari perspektif ilmu keagamaan mutakhir, Gus Dur sudah akrab dengan tradisi "*passing over*" (perspektif "ziarah spiritual" yang diperkenalkan John S. Dunne), atau tradisi petualangan spiritual, *spiritual adventure* gaya James Redfield, penulis novel spiritual yang *best selling* di pasar Amerika, *The Celestine Prophecy: An Adventure* (1993).

Wawasan spiritual-keagamaan Gus Dur yang inklusif dan pluralis itu kemudian menjadi jiwa dan ruh dirinya dalam menatap hampir semua agenda besar. Agenda demokrasi dan oposisi, misalnya, yang

menjadi keharusan dalam sistem politik modern, justru berangkat dari wawasan keagamaan Gus Dur yang sudah mencapai tahap *al-hanifyah al-samhah*. Yakni, sikap keberagamaan yang inklusif, pluralis, dan kosmopolit. Ia mendirikan Forum Demokrasi, karena panggilan ayat suci al-Qur'an berupa perintah untuk bermusyawarah (*syura*). Sebagai seorang demokrat, ia pun menjadi kiblat gerakan pro-demokrasi, yang untuk masanya, tampil sebagai figur oposisi-loyal terhadap jari-jemari kekuasaan. Ia oposan terhadap penguasa yang korup dan otoriter, tetapi tetap loyal terhadap cita-cita bersama. Yakni, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinnekaan.

Itulah hakikat demokrasi yang dicintai Gus Dur. Bahkan, "*saya tetap maju, bukan karena apa-apa, tetapi karena cinta saya kepada demokrasi*", tegas Gus Dur yang mengesankan itu.

b. Gus Dur: Antara Bapak Bangsa dan Kepala Negara

Dalam wawancaranya dengan Oriana Fallaci tahun 1972, Henry Kissinger mengatakan bahwa *untuk menjadi kepala negara tidak perlu keintelektualan, tetapi kekuatan, keberanian, dan kecerdikan*. Manusia-manusia intelektual yang hidup dari perenungan dan pemikiran tentang hakikat segala sesuatu tidak cocok untuk menjadi kepala negara. Manusia semacam itu lebih berguna jika menulis buku, bukan untuk diberi jabatan pemerintahan. Bayangkan jika orang seperti Goenawan Mohamad dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia karena kecerdasannya yang istimewa. Atau dulu pernah orang mencalonkan almarhum Nurcholish Madjid sebagai calon presiden. Banyak orang mengingatkan agar orang-orang cendekia seperti itu menjadi "bapak bangsa" daripada menjadi 'kepala negara'. Perbedaananya terletak pada kategori politik untuk 'kepala negara' dan kategori moral untuk 'bapak bangsa'.

'Bapak moral bangsa' itu urusannya kejujuran, kebenaran, dan kebebasan. 'Bapak negara' itu urusannya kekuatan massa, kecerdikan,

dan keterikatan ideologi. Menjadi bapak bangsa milik semua ideologi. Menjadi kepala negara harus masuk salah satu kebenaran ideologis. Kalau tidak demikian, tidak dipilih sebagai pemimpin politik. Kalau tidak demikian, ia tidak akan memiliki massa dan dengan demikian, tidak memiliki kekuatan nyata. Kekuatan moral tidak berambisi untuk menyusun kekuatan, apalagi memenangkan kekuatan dengan kecerdikan. Cerdik membutuhkan kecerdasan pragmatik bukan paradigmatik. Kecerdasan pragmatik tidak perlu kejujuran karena tujuan utamanya menggalang kekuatan.

Orang yang jujur pada dirinya tidak memikirkan kepentingan diri, kecuali kebenaran diri. Dan kebenaran diri juga kebenaran bagi orang-orang lain. Karena itu, seorang 'bapak bangsa' tidak terikat masa kekuasaan. Orang semacam itu tetap "berkuasa" meski sudah meninggal. 'Bapak bangsa' tidak mengenal masa jabatan.

Kepala negara dan selebriti

Seorang kepala negara itu seperti selebriti, populer dan berkarisma selama berkuasa, untuk dilupakan dan ditinggalkan bagi 'ban' tua setelah masa populernya habis. Seorang kepala negara berkarisma karena kekuasaan dan kekuatannya, seperti selebriti berkarisma karena kecantikan, suara, goyang pinggulnya, bahkan kenekatannya. Semua itu ada batas waktunya. Wajah kian menua, goyang pinggul semakin encek, dan kenekatannya membosankan. Dalam hal kekuasaan dan kekuatan, seorang kepala negara akan digusur oleh mereka yang lebih kuat.

Bahwa keintelektualan itu tidak diperlukan dalam jabatan kepala negara dapat dibuktikan oleh sejarah Indonesia sendiri. Para pemimpin kita yang lebih memilih hidup intelektual daripada hidup dalam kecerdikan, seperti Bung Hatta, Bung Syahrir, dan Tan Malaka, tak pernah populer di mata rakyat. Kaum intelektual itu minoritas. Kaum cerdik-pandai itu lebih populis. Semua itu disapu bersih oleh Bung

Karno yang lebih cerdas dan selebriti. Banyak yang mengingatkan bahwa KH. Abdurrahman Wahid mirip Nurcholish Madjid, lebih berperan sebagai 'bapak bangsa' daripada diberi kekuasaan sebagai 'kepala negara'. Ketika MPR *kepepet* memilihnya sebagai presiden, usianya tak lebih dari satu tahun. MPR *menjilat* ludahnya sendiri. KH. Abdurrahman Wahid tetap Gus Dur, tetap ceplas-ceplos jujur mengikuti nuraninya, tak peduli urusan pragmatik. Artinya, tetap intelektual, akrab dengan siapa saja, perenung, dan pemikir yang sulit diikuti oleh mereka yang malas berpikir.

Pemikir dan penguasa

Di banyak negara maju, pemisahan antara pemikir dan penguasa politik disadari rakyat yang rata-rata berpendidikan menengah. Jika Sartre hidup di Indonesia tahun 1950-an, ia tentu akan dijadikan kepala negara Indonesia karena kepopuleran gagasan filosofisnya. Namun, rakyat Perancis tidak bodoh. Mereka mencari kepala negara yang bukan pemikir, tetapi yang kuat, berani, dan punya ideologi yang harus dimenangkannya. Kalau Sartre dipilih menjadi kepala negara, tentu eksistensialisme akan dikubur seperti komunisme.

Dalam beberapa hal, Kissinger mungkin benar. Hal itu didasarkan pengalaman hidupnya sebagai tokoh yang selalu dekat dengan beberapa Presiden Amerika. Soeharto lebih cocok menjadi kepala negara daripada Henry Kissinger. Soeharto lebih kuat, lebih berani, dan lebih cerdas. Semua itu didukung kekuatan, meski bukan massa tetapi bersenjata. Karena kuat, ia telah mengantongi kekuasaan. Karena kuat, ia lebih berani dan tegas. Untuk mempertahankan itu semua ia perlu kecerdikan. Jika Soeharto tidak cerdas dan cerdas, tentu tidak akan menguasai Indonesia selama 32 tahun. Menyadari kekurang-intelektualannya, Soeharto mengangkat kaum intelektual sebagai pembantu-pembantunya.

Cacat intelektual yang utama adalah tidak mau cerdas. Politiknya mungkin cerdas, tetapi kebijakan pembangunannya terlalu cerdas sehingga pemikiran harus mengalah pada kecerdikan. Seorang intelektual yang menjadi kepala negara lama-lama bisa mengidap penyakit 'tidak waras', akibat konflik batin terus-menerus antara watak kekuasaan dan watak pemikiran. Menjadi kepala negara di Indonesia itu harus berani 'tidak waras'. Tidak waras dari segi intelektual dan tidak waras dari segi kekuatan. Marilah kita mencari orang tidak waras itu.

c. *Figur Santri Demokrat dan Tuntutan Publik*

Figur 'santri demokrat' memang cukup langka. Tetapi, lebih langka lagi adalah figur santri demokrat yang sukses tampil sebagai presiden. Itulah Gus Dur. Sewaktu berziarah ke makam orang tuanya, "*Ibu saya tampak sumringah (berseri-seri)*", cerita mistik Gus Dur, seraya menambahkan bahwa ziarah ke makam ayahnya merupakan awal perpindahan fase; dari perjuangan dengan kekuatan rakyat ke arah perjuangan pemerintahan. Dan terbukti benar, ia duduk sebagai Presiden Santri, santri *par excellence*, yang sekarang berjuang di jalur politik praktis (pemerintahan).

Dalam lika-liku politik praktis, watak demokrat Gus Dur betul-betul dimonitor publik. Pada level elite politik, misalnya, ia harus tampil bijak, adil dan akomodatif dalam penyusunan komposisi kabinet pemerintahan baru. Komposisi personelnnya, sudah barang tentu didasarkan pada asas keadilan dan proporsionalitas, di samping kualitas SDM yang menjadi kemestian. Pada proses ini, artikulasi watak demokratis Gus Dur betul-betul diuji; sesuai harapan publik atau justru mengecewakan.

Perlu diingat, itu pun sebatas komposisi personel kabinet. Belum lagi menyentuh tuntutan arus reformasi; mulai diadilinya Soeharto plus kroni-kroninya, mencabut dwifungsi TNI, memberantas korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN), sampai muncul lagi sederetan agenda reformasi baru yakni adili Habibie dan tuntaskan skandal Bank Bali. Di sisi lain, Gus Dur pun dihadapkan pada realitas massa bawah. Tercabik-cabiknya kawasan Ambon, Irian, Riau, Sambas, Jakarta sampai pulau Jawa, adalah potensi aktual ledakan politik yang sewaktu-waktu bisa benar-benar meledak.

Dalam kondisi inilah, Gus Dur dituntut arif, bijak, akomodatif, dan responsif terhadap pergolakan politik arus bawah. Gus Dur, yang dulu berulang kali menasihati Habibie agar peka politik, sekarang perlu membuktikan sendiri; *sense of politics*-nya, terutama, untuk mendeteksi denyut nadi politik rakyat Indonesia. Ketika rakyat bergolak, protes, dan mengakibatkan kerusuhan, tentu sudah bukan zamannya lagi seorang "Presiden Santri" menuding AS, ES, provokator di balik kerusuhan ini sampai kerusuhan itu.

Perlu sikap kenegarawanan sejati dalam mengelola konflik, termasuk mengelola konflik secara bijak massa PDI-P dan massa Habibie. Itulah harapan utama pada figur Gus Dur, yang diharapkan tampil sebagai *solidarity maker* di tengah beragam kelompok etnis, suku, agama, politik dan ideologis yang sedang bertikai. Gus Dur diharapkan bisa mengayomi semua kelompok dengan beragam kepentingan. Jika ini berhasil, ia akan tercatat dalam sejarah sebagai "Presiden Santri" yang akomodatif dan inklusif di tengah pluralitas ide dan sarat kepentingan politik. Perbaikan ekonomi pun diharapkan lambat laun akan membaik.

Namun, sekalipun demikian kaum santri masih berada di tangga kedua, meskipun ada tokoh kuat seperti Amien Rais dan Abdurrahman Wahid, disusul lainnya yang lebih junior. Bursa politik seolah sedang memihak figur nasionalis. Seakan berada di suratan takdir politik. Tesis Anderson sepertinya hadir kembali. Betapa sulit tokoh Muslim santri untuk tampil ke pentas politik di urutan paling puncak.

Dilema pun masih cukup panjang untuk dipecahkan. Kendala struktural di lingkungan internal kaum Muslim pun masih terus menjadi momok. Komunitas Muslim santri, selalu terjebak kendala yang klasik. Di satu pihak selalu mengklaim memiliki kekuatan politik yang disebut politik umat Islam sebagai kekuatan mayoritas di Republik ini. Tapi, umat Islam yang mayoritas itu ternyata sebatas kategori demografis, bukan kategori politik. Tak ada korelasi positif antara Islam secara demografis dengan Islam secara politik. Lebih-lebih yang menyangkut kualitas. Politik umat Islam pun seperti genangan danau, kelihatan luas tapi tak mengalir. Danau politik umat Islam pun terbelah dua, santri dan abangan sebagaimana tesis Clifford Geertz. Meski banyak dikritik, kategorisasi Geertz sepertinya masih berlaku. Mayoritas abangan lebih mengalir ke hilir politik nasionalis.

Ada kendala struktural yang lebih gawat lagi. Politik kaum santri selalu mengalami fragmentasi yang serius. Jika representasinya partai politik, maka jumlah partai politik yang mewakili komunitas umat Islam ini cenderung banyak dan sulit dipersatukan. Jangankan dipersatukan dalam entitas politik yang tunggal dan itu hampir mustahil, untuk dirasionalisasi pun selalu mengalami kesulitan. Masyumi memang pernah sukses, tetapi hanya sebentar karena PSII (tahun 1948) dan NU (tahun 1952) kemudian keluar dari naungan partai besar umat Islam itu. Pada masa Orde Baru, PPP tampil, tapi hasil rekayasa dan bukan kehendak murni dari umat Islam sendiri. Sedangkan pada era reformasi sekarang ini, karakter asli fragmentasi politik santri justru semakin kelihatan. Masing-masing punya syahwat politik yang cukup tinggi.

Tokoh-tokoh santri pun mengalami fragmentasi, mengikuti aliran politik masing-masing. Setiap tokoh, 'eceran' sendiri-sendiri. Bahkan sulit dipersatukan. Masing-masing membawa 'kerajaan'-nya sendiri-sendiri dan merasa semuanya menjadi raja. Tak peduli tokoh senior maupun junior. Ego politik mereka sangat tinggi. Sulit sekali berkoohesi

kecuali jika ada musuh bersama. Bahkan untuk saling peduli dan berbagi pun sepertinya 'jauh panggang dari api'. Akibatnya, mereka sulit untuk mencapai puncak kemenangan politik.

Dunia politik sulit dipisahkan dengan Islam, karena menyangkut etika dalam mengarungi hidup dan berupa penataan manusia untuk hidup sejahtera. Namun sekalipun tidak dapat melepaskan diri dari ranah politik, kaum santri juga harus mempertimbangkan dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Menjalinkan hubungan dengan Allah juga sering diungkapkan dengan hubungan vertikal. Hubungan vertikal ini hanya terkait antara Allah dan makhlukNya secara individual, sehingga banyak aliran yang muncul dalam Islam dengan ritual yang berbeda.⁷² Klaim kebenaran (*truth claim*) akan membuka pintu perselisihan dan konflik antara santri yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, hubungan vertikal bukanlah hubungan horisontal yang melibatkan manusia yang lain. Sedangkan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain disebut sebagai hubungan horisontal. Dalam hubungan horizontal ini, pelibatan hak asasi manusia yang lain merupakan tanggung jawab komunal. Begitu juga hubungan manusia dalam ranah sosial-budaya (politik dan sosio-kultural).

Secara umum, kehidupan manusia dapat diklasifikasikan pada struktural dan kultural. Hubungan struktural lebih banyak diidentikkan dengan kalangan birokrasi yang terjun dalam ranah politik, sedangkan pada hubungan kultural lebih bersifat informal antara individu yang satu dengan individu yang lain. Hal ini lebih banyak dilakukan manusia pada tingkat sosial. Kritik nalar politik⁷³

72 Dalam menempuh dan mencari kebenaran tentang Tuhan, dan mengadakan ruang "dialog" dengan Tuhan adalah ritual individu atau kelompok. Hal yang berbeda dengan kaum "kita" tidak dapat dijustifikasi kebenarannya atau dijustifikasi bahwa ajaran itu salah seperti "sesat" dan "halal darahnya". Baru-baru ini kelompok Ahmadiyah yang diserang FPI (Front Pembela Islam) karena dianggap "sesat", begitu juga fatwa MUI pada kaum santri Ahmadiyah dengan tidak mengakui keberadaannya dan mengklaim sesat (keluar dari agama Islam). Liputan enam siang SCTV, Rabu, 20 Juli 2005.

73 Abid al-Jabiri, *al-'Aql al-Siyasi al-'Arabi*.

dapat diperbincangkan dalam hubungan antara santri dan politik dalam struktur budaya masyarakat. Nalar politik Santri berarti pemikiran dan perilaku politik santri dalam ranah struktural masyarakat.

Secara hakiki, santri berperan sebagai penjaga moral keagamaan masyarakat lokal dari ancaman gerakan puritanisme Islam. Sebagai penjaga moral, santri tidak bergerak pada ranah politik praktis, tapi pada pengembangan rekayasa sosial-kemasyarakatan melalui pendidikan dan dakwah. Namun, memisahkan agama dengan politik adalah mustahil, sebab selain bersifat privat, agama juga merupakan ajaran tata perilaku kemanusiaan, sehingga ia bukan hanya sistem teologi tetapi juga sebuah kebudayaan yang kompleks.

Dalam *The Interpretation of Cultures* (1996), Clifford Geertz memetakan struktur Islam Jawa yang ia sebut sebagai *religion as a cultural system* (agama sebagai sistem budaya). Dalam hal ini, agama sangat potensial bagi praktik politisasi, sebab praktik keagamaan dan sistem teologinya mampu menciptakan kesatuan nilai yang menyedot ketundukan massa. Akhirnya, terciptalah primordialisme berdasarkan nilai keagamaan, yang dalam kalkulasi politik sangat menguntungkan.

Sedangkan 'santri kultural' adalah santri "pinggiran" yang selalu mengayomi masyarakat; membina hubungan sosial dan menjaga kebudayaan lokal sebagai tonggak kekuatan bangsa serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, seluruh peran yang dicita-citakan oleh santri kultural tersebut tidak akan dapat berjalan secara maksimal tanpa ada dorongan dan kesamaan dengan santri yang berada dalam ranah struktural. Oleh karena itu, jauh akan lebih baik jika ada upaya-upaya untuk memperjelas cita-cita sosial politik santri ke depan.

Belajar dari Kepresidenan Gus Dur

Kamis 26 Juli 2001 adalah hari terakhir Gus Dur berada di Istana—setelah tiga hari sebelumnya dijatuhkan oleh parlemen dari

kursi presiden. Sebelumnya, Gus Dur sempat bertahan tinggal di kediaman presiden itu dan menganggap Sidang Istimewa MPR, yang mengesahkan penggulingan dirinya, ilegal. Meski sebelumnya *ngotot* bertahan dan sempat membubarkan parlemen, Gus Dur kemudian mengalah. Megawati Sukarnoputri dilantik sebagai presiden baru.

Bagi banyak warga NU, jatuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan merupakan pukulan hebat. Lebih dari sekadar mantan ketua NU, Gus Dur adalah kiai yang terpendang sekaligus cucu pendiri organisasi bermassa besar tersebut. Apalagi, inilah untuk pertama kali tokoh kalangan Islam (tradisional, kaum sarungan) menjadi presiden. Tiga presiden Indonesia sebelumnya datang dari kalangan nasionalis, TNI, dan teknokrat.

Mengapa Gus Dur gagal bertahan? Adakah kegagalannya menunjukkan tak cocoknya kepemimpinan ala Nahdlatul Ulama dengan kebutuhan pemimpin di level nasional?

Kurang dari dua tahun masa kepemimpinannya, Gus Dur dituding melakukan banyak kesalahan. Ia dianggap tidak melaksanakan agenda reformasi, mengabaikan penegakan hukum, dan lalai memperbaiki ekonomi Indonesia yang remuk-redam. Selain itu, meski kejatuhannya dipicu oleh skandal Bulog dan Brunei, banyak orang menganggap kesalahan terbesar Gus Dur adalah karena gagal merangkul lawan-lawan politiknya untuk membangun pemerintahan yang kuat. Dalam porsi lain, ia mengulangi kegagalan Megawati dalam merebut kursi presiden, dua tahun sebelum Gus Dur naik menjadi Presiden.

Banyak orang mafhum, hanya dengan modal 11 persen suara di parlemen, Gus Dur tak bisa berjalan sendiri. Sebelumnya, ia memang merangkul sejumlah partai politik dengan membentuk kabinet pelangi. Tapi, dalam perjalanan, Gus Dur memecat sejumlah menteri, dari Hamzah Haz (PPP) hingga Kwik Kian Gie dan Laksamana Sukardi (PDI-P). Sakit hati politik itulah yang kemudian menggumpalkan keinginan partai politik lain untuk menjatuhkan Gus Dur. "Gus Dur

memang bukan orang yang mudah menggalang aliansi,” kata Ulil Abshar Abdalla, intelektual muda NU.

Tidak sulit memahami mengapa Gus Dur tak mudah membuat aliansi. Lahir dalam komunitas kiai, Gus Dur sedari kecil ditimang-timang untuk menjadi pemimpin. Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, 4 Agustus 1940, ini adalah cucu pendiri NU, Hasyim As’yari. “Darah biru” yang mengalir dalam dirinya itulah yang dipercaya mengantar talenta kepemimpinan tumbuh dan berkembang dalam dirinya. Ini sebetulnya pola umum dalam komunitas NU. Sejak awal pendiriannya, NU memang dibangun berdasarkan hubungan kekerabatan yang tinggi. Dalam sebuah risalahnya, antropolog Clifford Geertz mengatakan bahwa NU adalah organisasi sosial, persaudaraan, dan keagamaan yang menjadi pusat pertemuan hubungan klan, ekonomis, dan ideologis.

Itulah sebabnya menjadi cucu pendiri NU adalah anugerah tersendiri. “Gus Dur adalah cucu laki-laki pertama dari anak laki-laki pertama K.H. Hasyim As’yari. Akibatnya, dari bayi dia sudah *digadang-gadang* (dibesar-besarkan) sebagai pemimpin,” kata Zamakhsyari Dhofier. Di luar itu, Gus Dur juga memiliki pengetahuan yang luas. Ia memadukan pengetahuan Islam tradisional dengan pengetahuan Barat, yang modern. Ia pernah belajar pada K.H. Junaidi, ulama pemimpin Majelis Tarjih Muhammadiyah, *nyantri* di Pesantren Tegalrejo Magelang, Pesantren Tambakberas Jombang, dan Pesantren Krapyak Yogyakarta—dan diteruskan kemudian di Bagdad dan Mesir.

Tapi, menurut Ulil, karena “kebesarannya” itulah Gus Dur sulit menerima pandangan dari orang lain. Dalam sejarah kepemimpinannya di NU, ia tercatat memiliki beberapa seteru. Ia pernah keras bersitegang dengan Kiai As’ad Syamsul Arifin, seorang tokoh NU kenamaan, karena beberapa perbedaan dalam hal fikih Islam. Ia juga

sempat menyingkirkan lawan-lawan politiknya seperti Slamet Efendi Yusuf, tokoh NU yang menyeberang ke Golkar.

Meski demikian, Gus Dur secara umum toh diterima dengan terbuka oleh massa NU. Memasuki kepemimpinan NU secara struktural pada 1979, ia terpilih menjadi Ketua NU lima tahun kemudian dalam muktamar di Situbondo—untuk kemudian terus melaju hingga akhirnya menjadi presiden, Oktober 1999. Dengan kata lain, di level massa, pola kepemimpinan kekerabatan Gus Dur tidak dianggap sebagai persoalan yang mengganggu.

Dalam membentuk pola kepemimpinan NU—terutama dalam hal pembelengguan kaderisasi kepemimpinan dalam organisasi itu—fakta ini bertemu dengan intervensi pemerintah Orde Baru, yang sangat besar terhadap organisasi sosial dan politik, termasuk NU. Satu yang terpenting adalah intervensi dalam mutamar NU di Cipasung, Jawa Barat, 1994. Ketika itu, pemerintah berusaha mengganjal pencalonan kembali Gus Dur sebagai Ketua NU. Alasannya sederhana: Gus Dur dianggap menunjukkan sikap-sikap yang memusuhi pemerintah. Sinyal ke arah tak direstunya kiai yang humoris ini sudah tampak sejak hari pertama muktamar. Gus Dur tak duduk bersebelahan dengan Presiden Soeharto, yang membuka muktamar. Media massa juga mencatat bagaimana campur tangan pemerintah sangat terasa di sana: sekitar 1.500 tentara berjaga di sekitar Cipasung, dan lebih dari 100 intel dan pejabat keamanan mondar-mandir di arena muktamar.

Tokoh yang disuruh membendung Gus Dur di bursa Ketua NU adalah Abu Hasan. Kuat dugaan, ketika itu pemerintah mendukung Abu Hasan sambil memainkan politik uang. Tapi tudingan itu dibantah Hasan. Di akhir penghitungan suara, Abu Hasan itu kalah tipis, dengan mengantongi 142 suara—dibandingkan dengan 174 suara yang diperoleh Gus Dur. "Muktamar NU Cipasung merupakan muktamar yang paling kotor sepanjang sejarah ormas keagamaan

karena telah dicemari praktek jual-beli suara,” kata Ketua Panitia Mukhtamar, K.H. Munasir Ali.

Di mata pimpinan Pondok Pesantren Rembang, K.H. Mustafa Bisri, intervensi pemerintah itu justru memunculkan kembali figur Gus Dur ke permukaan—bahkan dengan sosok yang lebih meyakinkan. Sebelumnya, kiai-kiai NU telah menyiapkan nama lain sebagai Ketua NU, yakni K.H. Fahmi Saifuddin, ulama sekaligus anak bekas Menteri Agama Saifuddin Zuhri. Dibandingkan dengan Gus Dur, yang memiliki wawasan luas tapi lemah dalam pembenahan internal, Fahmi dipandang lebih menguasai manajemen organisasi. ”Dulu, rencananya, kepemimpinan Gus Dur hanya satu periode untuk kemudian digantikan oleh Fahmi guna menata organisasi,” kata Mustafa Bisri, ”Tapi rencana itu berantakan.”

Dengan fakta ini, tak aneh bahwa kemudian NU, seperti juga organisasi kemasyarakatan lainnya, mengalami kebuntuan dalam kaderisasi pemimpin. Kondisi ini ditambah lagi dengan tidak adanya lembaga yang secara formal memikirkan perihal kaderisasi kepemimpinan di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. ”Yang ada hanya lembaga informal seperti LDNU (Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama), Fatayat NU, atau Muslimat NU. Tetapi, itu pun belum dengan sistematika, materi, dan jadwal yang tetap,” kata Ulil.

Keadaan bertambah buruk ketika NU kemudian membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai konsekuensi liberalisasi politik sepeninggal Orde Baru. Sementara kaderisasi kepemimpinan NU tertatih-tatih, ada lembaga baru lain yang juga harus diisi dengan personel-personel yang kuat. Celakanya, dengan spirit khittah 1926, yang menjauhkan NU dari politik praktis, banyak tokoh muda NU yang berbakat telanjur duduk dalam lembaga-lembaga nonpolitik seperti dakwah, tarbiyah, dan kegiatan sosial lainnya. ”Ketika mereka ditawarkan menjadi kader PKB, mereka lebih banyak menolak dengan

alasannya masing-masing. Akhirnya, yang diperoleh PKB hanya kader seadanya,” kata Mustafa Bisri.⁷⁴

Alhasil, pulang asal. Dari kalangan sarungan itu, stok kepemimpinan nasional yang mumpuni tak tersedia. Apa yang dialami NU sejatinya hanya salah satu contoh bagaimana kekuasaan Orde Baru telah mematikan potensi kepemimpinan dari bawah. Butuh waktu lama untuk memperbaiki semuanya.

Belajar dari Suksesi Kepemimpinan NU

Muktamar NU ke-31 di Boyolali lalu menjadi harapan warga *nahdliyin* guna tercapainya suksesi pemilihan ketua umum dari persaingan kaum struktural versus kaum kultural. Persaingan itu sempat membingungkan warga *kaum sarungan*. Pasalnya, hal ini disebabkan karena terfragmentasinya warga NU oleh kalangan elit NU sendiri dan terdapatnya kekurang-konsistenan proses pendidikan politik.

Di tengah-tengah berlangsungnya acara Muktamar NU ke-31 di Boyolali, terdapat banyak sekali kesenjangan-kesenjangan yang hadir mewarnai sikap warga *nahdliyin*. Muktamirin yang diundang dari berbagai pelosok nusantara memiliki berbagai latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang kesenjangan ekonomi, perbedaan pendidikan, dan kultur masing-masing peserta muktamirin dianggap sudah menjadi hal lumrah.

Keadaan ini diduga karena banyak terdapat ketidakmerataan koordinasi antar elit NU, antara pengurus wilayah NU dengan pengurus pusat. Sangat ironis memang, ketika pemerataan koordinasi antar elit NU hanya terjadi manakala pengurus wilayah bersowan ke pengurus besar di Jakarta. Inilah yang terjadi pada kepengurusan Hasyim Muzadi, sehingga tidak dipungkiri lagi kemenangan Hasyim

74 Majalah Tempo Edisi. 24/XXX/13 - 19 Agustus 2001

Muzadi sebagai Ketua umum menjadi hal yang tak asing lagi. Selain itu, kekhawatiran warga *nahdliyin* pun muncul, yakni, masih lekatnya egosentrisme pengurus wilayah. Sifat egosentrisme wilayah terjadi karena adanya beragam patron kiai NU yang cenderung memihak satu sama lain. Selain itu hal ini disebabkan juga karena adanya perbedaan pendapat kiai sepuh yang bergabung membentuk poros-poros wilayah tertentu.

Perhelatan yang mewarnai muktamar hanyalah perhelatan yang terjadi di antara kalangan elit NU, perhelatan ini dianggap tidak mempengaruhi sikap warga *nahdliyin* dikarenakan kultur NU sudah sejak lama melekat, dicintai dan dimaknai sendiri oleh warga *nahdliyin*. Tantangan terbesar kalangan elit saat ini ialah bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat. Warga *nahdliyin* sepakat ketika terjadi peningkatan derajat pendidikan, maka akan terjadi pula peningkatan taraf hidup, sebab, salah satu akibat keterpurukan ekonomi masyarakat adalah ketertinggalan dari sudut pendidikan.

Kendati sudah menjadi kebiasaan jika dalam setiap muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ketegangan selalu terjadi, namun dalam muktamar ke-31 di Solo kali ini ada sesuatu yang berbeda. Para tokoh NU saling berseteru secara terbuka, mengarah perpecahan serius dalam intern organisasi kaum sarungan itu. Hal ini ditandai ancaman KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk membentuk "NU tandingan" jika KH Hasyim Muzadi terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Tanfidziyah PBNU 2004-2005.

Sikap Gus Dur agaknya mendapat dukungan arus bawah nahdliyin, terutama yang bergerak di ranah kultural untuk menjadikan NU tetap pada Khittah 1926 seperti dideklarasikan di Situbondo 20 tahun lalu. Kelompok ini merasakan NU telah disalaharahkan menjadi kendaraan politik segelintir elitnya yang duduk di struktur formal tanfidziyah, yang lima tahun terakhir di bawah kendali Hasyim Muzadi. Melalui muktamar ini, NU ingin diselamatkan dengan tidak

memilih Hasyim Muzadi yang dianggap "melanggar konsep kembali ke Khittah 1926". Maka berkembang isu "asal bukan Hasyim".

Sementara Hasyim Muzadi dengan kelompoknya tetap eksis dan melakukan perlawanan terhadap upaya Gus Dur untuk mendongkel atau menghalanginya. Sebelum muktamar, Hasyim melakukan konsolidasi dengan mengumpulkan para pengurus wilayah dan cabang, meyakinkan untuk maju sebagai Ketum Tanfidziyah, tak peduli ancaman perpecahan. Bagi Hasyim, kekuasaan di NU rupanya harus dipertahankan atau direbut kembali melalui muktamar ini, dan menganggap ancaman keterbelahan NU sebagai gertakan politik (*political bluffing*) dari pihak-pihak yang tidak menyenangkan, yang tak perlu digubris.

Konflik intern NU tak bisa dilepaskan dari "perang" dua figur utama, Gus Dur dan Hasyim Muzadi. Penyebabnya lebih bersifat personal, terkait perebutan pengaruh dan kekuasaan. Gus Dur merasa dikhianati Hasyim, padahal dialah yang membesarkan. Selama menjadi Ketum Tanfidziyah PBNU, Gus Dur menganggap Hasyim "jalan sendiri", tak peduli saran, kepentingan, dan kehendak Gus Dur. Perseteruan memuncak pada proses pencalonan capres/cawapres yang lalu. Gus Dur tak menghendaki Hasyim tampil (ada posisi cawapres), namun Hasyim tak menggubrisnya, terus maju mendampingi Megawati.

Perasaan Gus Dur tak bisa dilepaskan dengan tradisi NU yang memosisikan dirinya sebagai kiai (patron) dan Hasyim diposisikan sebagai santri (klien). Seorang santri atau mantan santri, meski sudah menjadi kiai dan pimpinan, diharapkan selalu tunduk atau setidaknya kompromistik terhadap kiai senior. Apalagi sang patron merupakan darah biru. Tetapi Hasyim menunjukkan watak sebaliknya, independen, egaliter, dan cenderung melawan. Apalagi ia menganggap diri sebagai pimpinan NU, merasa menguasai struktur, yang selama lima tahun terakhir cenderung "naik daun".

Maka sebagai orang yang punya watak, orientasi politis, dan kekuasaan yang kuat, ia mengabaikan tradisi warisan NU, untuk kemudian melangkah mewujudkan ambisinya dengan menjadikan NU sebagai kendaraan dan kalangan nahdliyin sebagai massa yang "dijual" atau dieksploitasinya. Sayang, hasil akhir perjuangannya membuktikan kegagalan, yang pada tingkat tertentu boleh dikata "mencederai dan memermalukan", karena sebagian besar massa NU tak memilihnya, meski kalangan pengurus NU sudah maksimal mempromosikannya.

Masalah utama yang dihadapi para figur yang memimpin NU adalah godaan kekuasaan yang selama ini sulit terhindarkan. Apalagi perjalanan sejarah NU tak bisa dilepas dengan politik dan kekuasaan, di mana pimpinan tanfidziyah (eksekutif) selalu memegang peran penting. KH Idham Chalid selama 32 tahun (1952-1984) menjadi Ketua Tanfidziyah PBNU. Ia tak pernah meninggalkan dunia politik selama memimpin NU. Kendati semula Gus Dur menentang dan berhasil memisahkan NU dari ikatan formal parpol (PPP), namun ia 'terjebak' dengan mendirikan PKB dan membawa NU tergiring secara formal ke kancah politik praktis.

Sementara KH. Hasyim Muzadi, dengan manuver individunya, menjadikan gerakan kultural NU terasa lumpuh selama lima tahun terakhir karena tak mendapat dukungan dan penguatan dari struktur formal NU. Akhirnya-inilah yang menjadi fenomena utama Muktamar Ke-31 NU--pertarungan kepentingan politisi NU untuk merebut struktur formal. Nahdliyin disodori figur politisi tanpa menyadari dampaknya jika mereka memilih politisi itu akan semakin menjadikan NU terperosok ke arah perjalanan yang kacau dan sarat muatan kepentingan politik.

Parahnya, jika skenario buruk ini terjadi, amat sulit untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah konflik. Mengapa? Karena tak adanya lagi figur yang bisa berperan sebagai peredam konflik intern NU. Soalnya, diakui atau tidak, peran figur karismatik (berwibawa)

di intern NU sendiri amat menentukan untuk menenteramkan dan mencegah terjadinya konflik berkepanjangan. Jika sebelumnya Gus Dur masih berpengaruh atau sebagai figur yang menentukan, maka sejak lengser dari jabatan presiden dominasinya kian berkurang, pengaruhnya melemah. Sama dengan Gus Dur, Hasyim Muzadi sendiri bukan penyelesaian masalah. Parahnya, jika Hasyim bersikeras tampil dengan asumsi ia bisa menyelesaikan masalah karena dikehendaki muktamirin (dari pengurus wilayah dan cabang), di tengah perlawanan Gus Dur dan aktivis gerakan sosial di intern NU, maka akan menjadikan pengurus NU kian tak bisa mengurus dan melayani warganya, tetapi hanya repot mengurus figur pimpinannya. Jika ini yang terjadi, jelas amat bertentangan dengan hakikat NU sebagai organisasi yang hadir untuk kepentingan warganya, bukan kepentingan segelintir figur politik yang hanya mengeksploitasi warga NU.

Ini berarti, jika peluang konflik atau perpecahan seperti disinyalkan Gus Dur tak diantisipasi, kemungkinan besar keterbelahan NU dengan berbagai dampaknya akan berkepanjangan dan tak terselesaikan. Soalnya, setuju atau tidak, mekanisme penyelesaian konflik intern NU akan gagal jika diselesaikan melalui mekanisme formal. Ini karena watak komunitas NU yang informalistik, di mana masing-masing figur kiai (tokoh) merasa setara, terutama jika tidak terbangun kepercayaan dan pengakuan terhadap seorang figur yang dianggap netral.

Maka sudah saatnya NU berpikir untuk memutuskan dua agenda utama: merumuskan dan menegaskan hubungan NU dan politik sehingga tak dijebak politik praktis, serta menegaskan kembali komitmen 20 tahun, yakni perlunya NU berdiri netral untuk kembali ke Khittah 1926 dengan menekankan gerakan kultural NU. Dalam kaitan itu, jika masih tetap berasumsi bahwa watak dan orientasi figur pimpinan berkorelasi positif dengan arah gerakan NU, sudah saatnya

mengantisipasi dengan memilih pimpinan NU yang tepat, tak memilih figur yang kontroversial.

2. Mendefinisikan Kembali Cita-Cita Sosial-Politik Kaum Sarungan

Apabila dilihat dari perspektif yang lebih luas maka antara aspirasi para santri elit dan konsepsi santri hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Sebagian besar kiprah dua politik kedua generasi ini yang berbeda didorong oleh ajaran-ajaran Islam yang sama misalnya *yāmuruna bi al-ma'ruf wa yanhawna 'an-i al-munkar* (menganjurkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang buruk). Namun demikian, dalam upaya merealisasikan tujuan umum itulah mereka cenderung beorientasi pada teks-teks keagamaan dalam maknanya yang skriptual. Mereka berobsesi untuk mengaitkan Islam dan negara secara formal dan legal, yang mendorong banyak dari mereka yang mempertahankan gagasan pembentukan negara Islam. Di sisi yang lain generasi intelektual muslim menganut pendekatan substansialis terhadap doktrin-doktrin kemasyarakatan. Dengan menekankan sisi substantif politik, mereka menolak tujuan politik Islam yang bercorak formalistis dan legalistik. Pemahaman mereka pada Islam lebih bercorak doktrin sosiologis masyarakat Indonesia.

Sekalipun ada perbedaan di antara kaum santri –pada dewasa ini- dengan kritisismenya,⁷⁵ kaum santri sepenuhnya percaya bahwa bentuk negara bangsa Indonesia dengan pancasila sebagai ideologinya sudah cukup memadai untuk mengakomodasi penerapan ajaran-ajaran sosial-politik Islam.

Tidak salah, kalau kaum santri mempertegas tujuan kaum santri Indonesia. Ada dua item pokok yang harus dilakukan kaum santri

75 Nur Khalik Ridwan, *Santri Baru; Pemetaan Wacana Ideologis dan Kritik* (Yogyakarta: Gerigi Pustaka, 2004), hlm. 232.

yaitu; *pertama*, pengembangan tatanan-tatanan politik yang egalitarian dan demokratis, dan *kedua*, pengembangan proses-proses ke arah pemerataan ekonomi. Dilihat dari berbagai kesulitan yang menimpa bangsa Indonesia dan umat Islam di negara Indonesia ini, baik dalam persoalan politik ataupun sosial, dua item tujuan tersebut tidak hanya relevan tetapi juga dapat mengobati kondisi bangsa dan umat Islam yang sangat merisaukan ini. Penataan tatanan politik yang egaliter akan mengantarkan kaum santri untuk memasuki kembali panggung politik nasional.⁷⁶

Sedikitnya ada dua unsur strategis yang terkandung dalam tatanan politik egaliter itu yaitu; *pertama*, dari perspektif yang berorientasi nilai, gagasan tentang tatanan politik egaliter dan demokratis mencerminkan prinsip-prinsip dasar politik Islam yang harus diterapkan (yaitu *al-'adl, al-musyawah, syura*); *kedua*, dari perspektif yang berorientasi tujuan, dengan mengedepankan tujuan sosial-politik dengan menolak gagasan negara Islam atau ideologi Islam, kaum santri telah memperlancar jalan bagi berlangsungnya integrasi ke dalam arus politik nasional, dan karena itu, setidaknya secara teoritis telah memperbesar peluang dan kesempatan bagi kaum santri untuk terlibat sepenuhnya dalam diskursus politik di Indonesia.

Apa yang telah dicapai dan dirintis kaum santri dalam dua dekade terakhir ini, baik kaum intelektual santri yang bergerak di bidang kultural dan santri elit atau struktural dengan politis dan birokratis telah menunjukkan struktur tindakan kaum santri pada terrealisasinya kedua tujuan utama akan menjadi mungkin.⁷⁷

NU sebagai organisasi masa Islam, sampai sekarang masih menjadi bahasan yang menarik di dunia akademik. Banyak peneliti asing yang tertarik dengan NU, di antaranya Martin van Bruinessen

76 Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 193.

77 *Ibid.*, hlm. 202.

, Greg Barton, Greg Fealy, Ben Anderson, Mitsuo Nakamura dan lain sebagainya. Mereka tertarik kultur NU dengan ketradisionalannya yang dianggap eksotik. Berbeda dengan aliran Islam lainnya, NU sangat menghargai tradisi dan kebudayaan setempat. Para peneliti ini mengikuti penelitian Antropologis yang sebelumnya pernah dilakukan. Mereka adalah Clifford Gertz, Andrew Beauty, Mark R. Woodward, Robert Hefner dan antropolog lainnya yang memfokuskan pada agama Jawa. Karya-karya yang dihasilkan oleh para peneliti ini hingga sekarang cukup populer dan selalu menjadi rujukan di dunia akademis baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Dalam konteks seperti ini, NU menjadi obyek penelitian. Para peneliti inilah yang memiliki otoritas untuk merepresentasikan NU, baik itu berupa sejarah, komunitas, perilaku, dan masa depan NU. Sebagai obyek penelitian, tentunya NU sama sekali tidak memiliki otoritas dalam merepresentasikan dirinya. Hasil-hasil penelitian beberapa peneliti ini, bukan tidak berdampak pada perkembangan Islam di Indonesia. Kita perlu menyadari bersama bahwa peneliti Barat bukan hanya sekedar meneliti atas nama pengetahuan belaka. Mereka datang untuk meneliti sekaligus membuat bangunan epistemologi gerakan Islam. Sehingga wajar jika gerakan Islam di Indonesia semakin bias kepentingan.

Kelahiran NU (Nahdlatul Ulama') diawali oleh suatu proses panjang. Bermula dari munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme ini ditandai berdirinya Serikat Islam (SI sebelum bernama Serikat Dagang Islam: SDI). Berdirinya Serikat Dagang ini mengilhami sejumlah pemuda pesantren yang bermukim di Mekah untuk mendirikan cabang perhimpunan itu di sana. Obsesi mereka masih terus berlanjut setelah menetap kembali ke daerah mereka masing-masing. Mereka mendirikan perhimpunan *Nahdlatul Wathon* (1914), *Tashwirul Afkar* (1918) dan perhimpunan koperasi *Nahdlatul Tujjar* (1918). Selain itu, di Surabaya didirikan pula perhimpunan

lokal yang sejenis antara lain Perikatan Wathaniyah, Ta'mirul Masjid dan Itta'Dibiyah. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan (jam'iyah diniyah) secara resmi berdiri tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya.

Kini 82 tahun sudah NU berdiri. Keberadaannya masih senantiasa memiliki implikasi yang positif untuk pengembangan Islam di Indonesia. Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, keberadaan NU senantiasa diperhitungkan dalam berbagai hal. Sebagai ormas, NU memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang cukup besar dalam menentukan hitam putihnya bangsa ini. Dalam perjalanan sejarah, NU memiliki andil besar dalam membangun bangsa Indonesia.

Pada dasarnya, prinsip umum ajaran sosial politik NU mengambil pola Sunni, yakni sikap *tawassuth*, *tawazun*, *ta'adul*, dan *tasamuh* serta *al-qiyam bi al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*. Dengan prinsip ini NU selalu mengambil sikap akomodatif, toleran, dan menghindari sikap ekstrim ketika berhadapan dengan spektrum sosial politik mana pun. Prinsip-prinsip yang senantiasa dijaga keberadaannya dari generasi ke generasi. Inilah sisi moderat yang terus dikembangkan dan diperjuangkan oleh NU. Moderatisme ini menjadi angin segar bagi anak-anak muda NU untuk terus berfikir lebih progresif dalam berbagai bidang.

Arus globalisasi dan modernisme serta liberalisme akhir-akhir ini berkembang pesat di Indonesia. Bahkan pemikiran fundamentalisme Islam rupanya juga mulai merebak hampir di seluruh pelosok nusantara. Peristiwa hancurnya gedung WTC enam tahun silam membuat peta gerakan NU bergeser. *Amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi agenda mendasar NU semakin ditinggalkan. Sementara isu untuk menjadi muslim moderat liberal atau menjadi fundamentalis ekstrimis gencar di kalangan anak muda NU. *Binary opposition* ini telah menjangkiti paradigma berfikir anak muda NU. Seolah NU tidak memiliki pola gerakan yang lepas dari gerakan mainstream yang

sudah diagendakan Amerika. Hal inilah yang menyeret posisi agama menjadi lahan yang subur untuk dieksploitasi dan dikomodifikasikan. Bahkan yang paling mengerikan adalah jika terjadi konflik sesama penganut Islam.

Kita masih ingat peristiwa pemberontakan '65. Pada saat pembersihan PKI, NU berada di garda paling depan. NU tidak sadar kalau sebenarnya posisinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka memanfaatkan gerakan NU untuk kepentingan sesaat saja. Kita ketahui bersama bahwa gerakan '65 merupakan gerakan korporasi Amerika untuk menghabisi paham komunis yang berkembang di Indonesia. Pada saat itu, NU tidak melihat lebih jauh tentang *setting* di balik penumpasan gerakan '65. Ketidaksadaran orang-orang NU membuat nilai-nilai kemanusiaannya hilang. Sehingga NU terjebak pada gerakan yang menjadi agenda besar Amerika di Indonesia ketika itu.

Setiap tanggal 30 September dan 1 Oktober kita tidak akan lupa atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1965, yakni tragedi di mana beberapa jenderal pimpinan teras TNI/Angkatan Darat diculik lalu dibunuh. Juga pembunuhan massal dengan korban beratus ribu rakyat anggota dan simpatisan PKI dan keluarganya. Sekarang, setelah 42 tahun peristiwa itu terjadi, banyak di kalangan kita yang bertanya-tanya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Begitu kejamkah bangsa ini, sehingga bisa membunuh para jenderal pimpinan TNI/Angkatan Darat dengan terencana dan saudara sebangsa dan se Tanah Air secara massal? Sebab, "pembunuhan" itu terjadi di seluruh pelosok Tanah Air. Untuk itu, marilah kita teliti peristiwa itu secara tenang, dengan harapan, peristiwa semacam itu tidak boleh terjadi lagi di negeri ini.

Peristiwa yang terjadi hampir 42 tahun lalu itu adalah sebuah 'peristiwa politik'. Sebagai peristiwa politik, tragedi itu adalah sebuah anti klimaks akumulasi peristiwa politik sebelumnya. Rentetan

peristiwa politik sebelumnya, merupakan rangkaian peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa tanggal 30 September. Bagaimana gambaran keadaan sebelum tragedi itu?

Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Keluarnya Dekrit itu merupakan upaya untuk keluar dari kemelut politik saat itu, di mana Pemilu 1954 dan 1955 tidak berhasil melahirkan kehidupan politik yang stabil dan gagal merumuskan UUD baru, khususnya dalam menyepakati dasar negara, antara Islam dan Pancasila. Sebelumnya, pemberontakan daerah terjadi tahun 1957 di Sumatera Barat (PRRI/Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan di Sulawesi Utara (Permesta/Perjuangan Rakyat Semesta). Karena kedua pemberontakan itu, Partai Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia), dua partai yang dikenal sebagai "lawan-lawan" politik PKI, dibubarkan tahun 1960. Keseimbangan politik terganggu, setapak demi setapak, ke arah dominasi PKI dalam percaturan politik dalam negeri. Ofensif politik PKI kian gencar, dalam bentuk demo dan publikasi melalui media yang dikuasai, dengan aneka tuntutan dan slogan yang bombastis. Bahkan tindak kekerasan, misalnya Peristiwa Peltu Soedjono di Medan dan peristiwa Kanigoro di Kediri, untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya.

Selanjutnya, tanggal 12 Mei 1964, melalui tangan-tangan politiknya, PKI berusaha menyingkirkan kelompok yang dianggap lawan politiknya, antara lain upaya membubarkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Upaya itu dimulai dengan peristiwa "Utrecht" di Universitas Brawidjaya Cabang Jember. Saat itu Sekretaris Fakultas Hukum Unibraw cabang Jember, Prof Drs Ernest SH, Utrecht menetapkan HMI sebagai organisasi terlarang di Fakultas Hukum Unibraw. Alasannya, HMI terlibat PRRI/Permesta, DI/TII, percobaan pembunuhan Presiden Soekarno dan agen CIA. Sejak itu tuntutan terhadap pembubaran HMI meluas, sehingga wajar bila kemudian

terjadi pro-kontra. Adalah wajar, bila yang membela HMI kian "berani", sejalan makin beraninya PKI menyampaikan tuntutanannya.

Gemuis (Gerakan Muda Umat Islam) misalnya, saat berdemo membela HMI di depan kantor Kotrar (Komando Tertinggi Retuling Apparatur Revolusi) di Jalan Merdeka Barat, sempat menjunjung spanduk "Langkahi mayatku sebelum bubarkan HMI". Sementara itu, tuntutan PKI untuk ikut duduk dalam pemerintahan, selalu gagal. Tuntutan membentuk Angkatan kelima, setelah TNI AD, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi juga gagal. Hal ini membuktikan, Bung Karno juga enggan untuk memenuhi tuntutan PKI. Konsep Nasakom (Nasionalis Agama dan Komunis) diimbangi konsep Nasasos (Nasionalis, Agama, dan Sosialis) yang antara lain dikembangkan oleh Jenderal Ahmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat. Polarisasi kekuatan politik kemudian terbelah menjadi dua.

Untuk mengimbangi kekuatan PKI, kalangan militer, khususnya TNI/Angkatan Darat mengambil prakarsa menggalang potensi dengan rakyat, antara lain dalam wujud BKS (Badan Kerjasama Sipil-Militer), misalnya buruh-militer, pemuda-militer, dan sebagainya. Demikian juga organisasi-organisasi independen, SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia), Muhammadiyah, MKGR, Al-Washliyah, HMI, dan lainnya bergabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) di dalam Front Nasional yang dibentuk saat itu, sebagai wadah menghimpun seluruh kekuatan revolusioner.

Klimaks semua itu dimulai 29 September 1965. Di Istora Senayan, ribuan anggota CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), meneriakkan yel-yel bubarkan HMI di hadapan Bung Karno, Waperdam (Wakil Perdana Menteri) Leimena, dan Ketua CC PKI DN Aidit. Yel-yel anggota CGMI itu didukung DN Aidit, yang memberi sambutan sebelum Waperdam Leimena dan Bung Karno. Kemudian apa yang terjadi? Waperdam Leimena maupun Bung Karno tegas menolak tuntutan itu. Bung Karno, bahkan akan

membubarkan CGMI bila CGMI juga kontra revolusi. Maka, tanda-tanda antiklimaks telah dimulai.

Pada saat bersamaan, kegiatan G30S agaknya sedang disiapkan. Sebab, malam berikutnya (30 September) sesuai Bung Karno berbicara di depan Munas Teknik di Istora Senayan, para jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Jenderal Nasution lepas, sementara Mayjen Soeharto, Panglima Kostrad saat itu agaknya tidak menjadi sasaran penculikan. Suasana panas berdampak jauh, saat G30S dilancarkan, diawali dengan penculikan lalu pembunuhan jenderal pimpinan TNI/ Angkatan Darat di Jakarta, dan berlanjut di daerah, antara lain di Yogyakarta, di mana Kolonel Katamso diculik dan dibunuh. Naluri untuk melawan G30S menjadi demikian luas, termasuk partai politik dan kekuatan masyarakat lain yang selama orde lama tidak berdaya menghadapi PKI.

Masyarakat, seolah-olah dihadapkan pilihan, dibunuh atau membunuh. Maka, terjadilah pembunuhan yang demikian luas di seluruh Tanah Air terhadap anggota PKI dan simpatisannya, termasuk keluarganya. Ibaratnya, seperti air bah yang sulit dibendung. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Dalam keadaan seperti itu, peran kepemimpinan nasional tentu amat penting. Sayangnya, justru kepemimpinan nasional praktis menjadi "lumpuh", setidaknya, tidak satu. Presiden Soekarno, sebagaimana kita ketahui dalam catatan sejarah, mengangkat Jenderal Pranoto Reksosamudra menggantikan Jenderal Ahmad Yani sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Dalam keadaan seperti itu, kepemimpinan nasional menjadi tidak efektif mengatasi kemelut nasional, sebab, pandangan kepemimpinan nasional ternyata tidak satu. Ada "dualisme" dalam menghadapi G30S, khususnya antara Pak Harto dan Bung Karno (yang menunjuk Jenderal Pranoto), sehingga kepemimpinan nasional tidak bisa berbuat apa-apa ketika terjadi pembunuhan anggota PKI dan simpatisannya. Dalam keadaan seperti itu, tersiar rumor yang memicu keadaan kian

kalut yaitu daftar tokoh yang akan dibunuh, bila G30S "menang". Atau sebaliknya, tokoh PKI yang berbahaya di daerah. Tidak jelas, siapa yang membuat daftar hitam itu. Namun, apa yang dikatakan Bung Karno perlu dicermati. Bung Karno mengatakan, peristiwa G30S disebabkan tiga hal. *Pertama*, adanya subversi Nekolim. *Kedua*, adanya orang-orang PKI yang "keblinger". *Ketiga*, adanya oknum-oknum yang tidak benar. Dari ketiganya, mana yang paling dominan? Bung Karno, tidak menyebut secara spesifik. Bila akhirnya Bung Karno juga jatuh, apakah semua itu bagian dari strategi menjatuhkan Bung Karno? Jawabnya, tidak mustahil.

Upaya menyingkirkan Bung Karno sudah berlangsung lama, baik melalui pembunuhan maupun upaya-upaya lain, termasuk "intervensi militer". Dari peristiwa PRRI/Permesta sampai tertembaknya seorang pilot, Allan Pope di Maluku. Sejauh apa keterlibatan asing itu? Meski kita tidak bisa membuktikan, namun adanya intervensi asing adalah logis, mengingat sikap-sikap Bung Karno terhadap "Nekolim" (Neokolonialisme), termasuk sikapnya keluar dari PBB dan membentuk *The New Emerging Forces*. Bung Karno, tentu mempunyai alasan sendiri bersikap seperti itu. Namun, Willem Oltman, seorang wartawan Belanda, membenarkan intervensi asing itu, dalam buku *Global Terrorist*, termasuk adanya daftar hitam yang diduga disebarkan melalui kalangan asing, yang ternyata berdampak bunuh membunuh sesama kita semakim meluas.

Pada minggu ketiga Oktober 1965, pembunuhan telah berlangsung. Tidak hanya dilakukan kalangan Islam, tetapi juga kalangan nasionalis. Kesan yang muncul adalah sudah menjadi gerakan massal yang sulit terkendali. Sebabnya, karena kepemimpinan nasional yang tidak satu dalam menyikapi G30S, sehingga aparat pemerintah praktis lumpuh, tidak mampu berbuat apa-apa. Bagaimana sikap Bung Karno? Melihat semua itu, Bung Karno amat sedih. Ia melontarkan gagasan "keruk-nasi" (kerukunan nasional) untuk membangun kembali

kerukunan nasional. Bung Karno meminta HMI mengirim misi ke Jawa-Tengah, untuk melerai suasana panas.

Beberapa kali, Menteri Dalam Negeri/Gubernur DKI Dr Soemarno dan Wagub Dr Soewondo melakukan pertemuan dengan PB HMI untuk menyiapkan misi itu. HMI siap melaksanakannya, namun akhirnya rencana itu tidak berujung pangkal. Bung Karno, tampaknya tidak kuasa lagi, sampai akhirnya keluar Surat Perintah 11 Maret yang terkenal itu. Surat Perintah itu, sudah agak terlambat. Seandainya lebih awal diberikan, siapa yang bertanggung jawab menjadi jelas dan mungkin tidak akan berdampak korban sebesar yang telah terjadi.

Mengesankan, di saat kritis, mestinya kita perlu kepemimpinan nasional yang kuat dan satu, tidak terbelah. Tetapi, itulah lembaran hitam sejarah bangsa ini. Kita sering tidak satu, bahkan selalu bercekcok, meski dalam keadaan krisis, sehingga krisis yang kita hadapi tidak kunjung pulih. Siapa yang salah? Agaknya, kesalahan kolektif bangsa.

Dalam pandangan penulis, hadirnya Islam fundamentalisme dan Islam liberal ataupun Islam modern kalau ditelisik lebih jauh, akan sangat kelihatan kalau itu adalah paket orientalis. Kaum orientalis mengukuhkan bentuk baru tradisi keislaman yang menempatkan orang-orang Islam sebagai kuli di negeri sendiri.⁷⁸ Adanya gerakan ini, tidak saja memberikan indikasi keberhasilan konstruksi orientalis dalam mengembangkan Islam menjadi modern ataupun liberal, tetapi sekaligus menempatkan pada posisi ketidaksadarannya. Di mana kesadaran itu ditempatkan tidak terpisah dari sejarah masa lalunya. Dengan demikian, mereka yakin bahwa dirinya tidak lepas dari asal usulnya. Padahal mereka juga tidak sadar kalau dirinya berada dalam himpitan hegemoni Amerika.

78 *Ibid.*, hlm. 412.

Terkait dengan keberadaan NU yang senantiasa diinterpretasikan dan ditulis oleh orang yang berada di luar NU, maka NU perlu untuk menulis ulang sejarahnya yang mulai dilupakan. Misalnya tentang sejarah Ahlussunah Wal Jama'ah, Fiqh Siyasah, HAM kultural dan Ushul Fiqh sebagai pencerahan pemikiran. Dengan meng-*qiyas*-kan gagasan dengan kitab-kitab kuning yang selama ini menjadi tradisi pesantren dengan permasalahan praksis kebangsaan, dan keindonesiaan serta kritik poskolonial, maka NU akan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan memposisikan NU sebagai subyek yang mengerti dirinya sendiri, maka NU tidak akan menjadi 'buruh' lagi di negeri sendiri. NU akan menjadi organ yang mandiri dan menjadi 'juragan' atas dirinya sendiri.

Kita mestinya bisa belajar dari Edward Said yang bisa dikatakan "*changing the subject*", ia telah berhasil menggeser posisi obyek menjadi subyek. Kini sudah saatnya kita mengubah posisi obyek yang direpresentasikan menjadi subyek yang merepresentasikan. Kalau Islam dipetakan menjadi dua pilihan *biner* maka hanya ada dua kemungkinan pula gerakan Islam. Pandangan orang-orang yang diuntungkan oleh liberalisme dan fundamentalisme tentunya berbeda dengan orang yang dirugikan. Liberalisme dan fundamentalisme ingin menunjukkan dirinya seragam. Dua paradigma gerakan ini ingin menampilkan keseragaman di hadapan orang-orang yang menghadapinya.

Fundamentalisme Islam misalnya, ia datang dengan misi memurnikan agama Allah. Sedangkan liberalisme muncul atas kegerahan adanya Islam puritan yang tidak menghargai kebudayaan lokal. Kedua frame gerakan ini rentan terhadap pertikaian dan konflik agama karena kedua frame gerakan ini jelas-jelas bertentangan. Untuk menghadapi problematika oposisi biner seperti ini, NU harus tetap berada di jalan tengah (*tawassuth*). NU harus mampu mengeluarkan suara lain

yang tidak memihak pada fundamentalisme dan tidak terjebak pada liberalisme.⁷⁹

3. Kaum Sarungan dan Konseptualisasi Baru di Bidang Politik

Di era Soekarno, di satu sisi, kaum sarungan kadang mendukung dan menjadi bagian dari kekuasaan, sementara di sisi lain kadang

79 Buku berjudul *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal, 2006* karya **Ahmad Baso**, muncul atas kegelisahan anak muda NU atas keterjebakan gerakan NU. Buku ini hadir untuk membongkar balik keterjebakan epistemologi gerakan progresif Islam. Mengikuti jejak pemikiran posmodern Michael Foucault dan Jaques Derrida serta tokoh-tokoh poskolonial seperti Edward W Said, Gayatri Spivak, Frantz Fanon, Homi K. Bhaba dan tokoh poskolonial yang lainnya, penulis menggugat dan membongkar epistemologi gerakan NU, kemudian mencoba menuliskannya kembali. Buku ini menawarkan NU Studies sebagai terobosan baru dalam pemikiran Islam di Indonesia. Dengan senantiasa membongkar dan mencari liminalitas (ruang antara), pemikiran NU bisa semakin berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman. Liminalitas inilah yang sebenarnya menjadi prinsip mendasar dalam gerakan NU. Dengan menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam aswaja, keterjebakan pemikiran tidak akan terjadi. Sebenarnya NU Studies ini muncul untuk mempertegas buku sebelumnya yaitu Islam Pasca Kolonial. Buku ini menjadi cambuk tersendiri bagi anak-anak muda NU yang cenderung liberal maupun fundamental. Ulil Absor Abdala yang menjadi ikon Islam Liberal tiba-tiba saja surut dari khasanah intelektual Islam. Akan tetapi bukan berarti Ulil kalah dalam perdebatan ini. Sekarang, Ulil sedang bertapa di Negri Paman Sam. Saya kira Ulil menyimpan tenaga untuk memberikan gebrakan Islam di Indonesia. Kita tunggu saja bagaimana nanti setelah pulang dari Amerika Ulil menanggapi tantangan dari sahabatnya ini. Yang pasti buku ini menjadi cambuk tersendiri bagi anak-anak muda NU. Tidak saja yang bergerak pada dua paradigma itu. Buku ini juga memberangus pemikiran-pemikiran anak muda yang berbeda dengan mainstream untuk berkembang. Kiranya buku ini tidak bermaksud menyudutkan para aktivis gerakan Islam baik yang bergerak dalam fundamentalisme Islam ataupun fundamentalisme neoliberal. Buku ini memfokuskan kajiannya di wilayah kekacauan epistemologis dan praksis gerakan Islam. Dengan membaca buku ini kita diajak berfikir kembali tentang gerakan pemikiran Islam dan keterjebakannya pada nalar oposisional. Oleh karena itu tepat kiranya jika buku ini digunakan sebagai pintu masuk untuk memperdalam kritik terhadap gerakan Islam yang telah menjangkiti nalar gerakan Islam di Indonesia. Buku ini juga sekaligus memberikan alternatif gerakan yang harus diambil oleh aktivis gerakan Islam dalam menghadapi arus globalisasi, dan liberalisme serta benturan peradaban yang dijadikan blue print oleh Amerika terhadap dunia ketiga. Rangkaian tulisan buku ini cukup rumit dan gaya bahasanya juga terlalu tinggi untuk orang-orang awam. Sehingga hanya bisa dimengerti oleh *the well educated class* saja. Kiranya buku ini akan lebih mudah dipahami dan dikonsumsi masyarakat bawah (terlebih NU kultural), jika dituliskan lebih bumi.

menentang dan berada di luar kekuasaan. Pola seperti ini juga kita temui pada era Soeharto. Bahkan, jika dicermati, juga terjadi pada pemerintahan sesudahnya, yakni Habibie, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini. Fragmen sejarah kaum sarungan dan demokratisasi cukup penting terutama di masa rezim Soeharto/orde baru. Dalam konteks relasi dan tarik menarik antara Islam (lebih tepatnya kaum sarungan) dengan rezim kekuasaan, maka rezim kekuasaan tampaknya memainkan peran yang lebih dominan.

Ini bisa dimaklumi karena kekuasaan punya *power* dan aparat *coersive*. Rezim kekuasaan seringkali bertindak pragmatis. Demi mempertahankan kekuasaannya, maka rezim kekuasaan melakukan manuver apa saja: kadang merangkul, tapi kadang juga memberangus Islam. Untuk itu masuk akal juga jika ada ide sekularisasi, di mana agama (khususnya Islam) coba dipisahkan dari negara. Jika mendekati ke entitas negara dan kekuasaan, maka agama (Islam) sangat rentan karena bisa diperalat untuk melanggengkan kekuasaan, bahkan untuk menguasai dan menindas masyarakat. Untuk menetralkan ide ide sekularisasi, Soekarno misalnya, mencoba merangkul komunitas agama khususnya Islam lewat ideologi nasakom-nya, yakni mencoba menyatukan tiga unsur penting: nasionalisme, agama, dan komunisme. Rezim kekuasaan seringkali alergi terhadap Islam politik dan Islam ideologis yang kadang kala sangat obsesif menegakkan tatanan kehidupan berdasarkan syariat Islam, hukum Islam, dan puncaknya mendirikan negara Islam. Beberapa di antaranya bahkan melakukan pemberontakan radikal bersenjata, ingin memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan negara Islam. Benih-benih Islam ideologis muncul bahkan sebelum pemerintahan Soekarno, di masa pemerintahan Soekarno, dan di masa Soeharto. Di era reformasi pun benih-benih Islam politik dan Islam ideologis tetap ada, bahkan mungkin sampai kapan pun.

Dari situlah, rezim Soeharto lantas mengidap Islamophobia (ketakutan terhadap Islam) yang berlebihan, kemudian melakukan langkah langkah represif dengan cara mendepolitisasi Islam, atau minimal menyudutkan Islam ke pinggir, terutama pada sepuluh tahun pertama pemerintahan rezim Soeharto. Puncaknya adalah ketika terjadi ideologisasi dan pengasastunggalan Pancasila. Baru pada era 1990-an, ketika rezim Soeharto merasa menghadapi tekanan yang gencar dari berbagai kelompok pro demokrasi, maka Soeharto pun mencoba merangkul, memanfaatkan, atau bahkan memperalat kelompok Islam yang dulu didepolitisasi dan diusir ke pinggir sejarah. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Soeharto seringkali mempromosikan Islam "kultural" sambil dengan tegas menekan Islam "politik". Soeharto pun tidak segan-segan melakukan ritual-ritual Islam, yang menurut beberapa pengamat, lebih tampak sebagai fenomena politik daripada spiritual. Tujuannya jelas untuk mengelabui umat Islam dan mengharapkan dukungan dari umat Islam sebagai kelompok mayoritas agar kekuasaan Soeharto tidak tergoyahkan. Oleh karena itu, agak tepat jika aktivitas keagamaan Soeharto di era 90-an tersebut diistilahkan sebagai "kosmetik politik" belaka.

Di era 90-an, untuk mengamankan kekuasaannya setelah ia mendapat "serangan" dari berbagai kelompok pro demokrasi, Soeharto mencoba mendekati dan memikat komunitas Islam dengan berbagai manuver yang halus tapi licik. Beberapa di antaranya, misalnya: pendirian masjid yang terus digencarkan, pengiriman da'i-da'i yang sudah dilitsus ke berbagai pelosok tanah air, pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pendirian pers Islam (misalnya Republika), islamisasi atau "hijauisasi" lembaga pemerintahan terutama di kabinet pembangunan VI dan lembaga DPR. dan beberapa lagi lainnya. Pada era 90-an dan terutama menjelang akhir kekuasaannya tahun 1998, Soeharto mencoba merangkul kelompok Islam seluas mungkin, khususnya

kelompok Islam (ultra) konservatif. Pada era ini, Soeharto sedang memainkan kartu Islam untuk menghadapi kalangan militer dan gerakan pro demokrasi yang telah mulai menantang kekuasaannya.

Pada saat Soeharto gencar-gencarnya mendekati dan memainkan faktor Islam untuk menyelamatkan kekuasaannya, maka kemudian muncul istilah "Islam yang Tertundukkan" dan "Islam Rezimis" yang dilansir untuk menunjuk kelompok Islam dari sayap sipil dan militer yang membentengi kekuasaan Soeharto. Yang banyak disorot terkait dengan hal itu, terutama adalah manuver Prabowo, seorang jenderal militer menantu Soeharto yang licik dan ambisius, yang mencoba membentengi kekuasaan Soeharto dan merintis ambisi jabatan pribadinya, dengan cara menjalin konspirasi dengan kelompok Islam ultra konservatif.

Baik di era Soekarno, atau apalagi di era Soeharto, komunitas Islam tertentu lewat para pemuka agamanya, ironisnya kadangkala justru menjadi alat legitimasi untuk mendukung kekuasaan yang otoriter dan tidak demokratis. Agama, khususnya Islam, dalam pentas sejarah tanah air ini sering kali menyiratkan paradoks: kadang bisa menebar kedamaian, sekaligus memicu kekerasan. Kekerasan terbesar dan tragedi kemanusiaan dalam sejarah tanah air dan ironisnya melibatkan komunitas Islam, misalnya terjadi setelah peristiwa G 30 S PKI, di akhir tahun 1965 dan sepanjang tahun 1966. Dalam tragedi saling bantai anak bangsa ini, diperkirakan sekitar lima ratus ribu nyawa manusia melayang. Agama kadang kala bisa juga menjadi pemicu pertikaian dan kekerasan, bahkan antar pemeluk agama yang berlainan, atau bahkan antar berbagai aliran dalam satu agama sekali pun.

Wacana yang cukup penting dalam konteks demokratisasi bangsa dan selalu terulang pada berbagai fase sejarah tanah air adalah dialog, debat, bahkan pertikaian, antara komunitas Islam literalis dengan komunitas sekuler. Kelompok yang belakangan ini bisa berasal dari

akar agama tapi juga bisa berakar dari "luar" agama. Debat antara komunitas Islam Literalis versus komunitas sekuler (yang paling lantang misalnya diwakili komunitas Islam Liberal) di seputar agama dan negara, masih ramai terjadi di era reformasi.

Dalam konteks ini, jika ditarik dalam fenomena yang lebih luas dan umum, selama dekade awal abad ke 20, gagasan nasionalisme merupakan fokus perdebatan politik paling seru di dunia Islam. Lebih dari seabad umat Islam bergumul dengan persoalan bagaimana mempertemukan politik Islam dengan gagasan kebangsaan dan kewarganegaraan. Ini kian terbukti pada akhir abad 20 dalam pertarungan antara nasionalisme sekuler (atau non konfensional) dan nasionalisme Islam.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila yang dirumuskan Soekarno merupakan perpaduan yang unik antara ide ide nasionalisme, Islam, marxisme, demokrasi liberal, dan ide ide kerakyatan Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, perpaduan berbagai ide tersebut diharapkan bisa memuaskan kalangan nasionalis sekuler dan nasionalisme Islam.

Dari bahasan di atas, bisa ditarik suatu pelajaran bahwa di masa depan Islam bisa punya sumbangsih terhadap demokrasi, bisa juga tidak. Dalam persoalan demokratisasi sebagaimana juga ditemui pada berbagai negara di belahan dunia dalam berbagai fase sejarah Islam ternyata berwajah dua. Di satu sisi Islam bisa sejalan dengan demokrasi, tapi di sisi yang lain justeru bertentangan. Hal ini sangat tergantung pada bagaimana Islam diekspresikan oleh para pemeluknya.

Warna Islam sedemikian banyak dan beragam, sehingga persentuhan Islam dengan demokrasi, politik, negara, pemerintahan, dan masyarakat manusia di luar Islam pun, bisa sangat banyak ragamnya. Maka yang penting bukan faktor Islamnya itu sendiri, melainkan ekspresi para pemeluk Islam dalam dunia yang riil.

Lebih dari kenyataan itu, sejarah tidak pernah berakhir, tidak ada kemenangan idealitas demokrasi yang definitif. Zaman kita tetap zaman percobaan demokrasi dan apakah lebih baik atau lebih buruk, putusan sejarah akan beragam.

'Melirik' kaum santri tidak bisa lepas dari sebuah kepentingan, yaitu kepentingan untuk membaca kaum santri saat ini, karena mereka adalah tonggak budaya yang akan meneruskan perjuangan untuk menyejahterakan manusia dan masyarakat Indonesia. Regenerasi dalam kehidupan manusia tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, harus ada generasi santri kultural yang usianya masih muda dan dapat diharapkan. Dalam hal ini lebih tepatnya santri muda tersebut adalah "kelompok imajiner" yang bisa dibaca karena disatukan oleh ide, sikap dan pola tingkah laku serta tantangn-tantangannya. Mereka ini lahir, karena berbicara atas nama, kondisi dan tantangan yang mereka hadapi.

Generasi santri akan muncul kalau ide dan sikap santri yang sudah "tua" sudah dianggap memiliki kelemahan, sekecil apapun kelemahan itu lalu memproyeksikan ide dan gagasan serta struktur tindakan baru. Inilah yang disebut 'titik kritis' dalam sebuah generasi kaum santri, yang bisa saja terus dipertahankan demi kepentingan jatah pendapatan mereka sendiri, karena minimnya bacaan-bacaan yang dimiliki, atau bisa jadi karena lemahnya melihat tanda-tanda zaman ke depan. Generasi seperti ini, tentu saja secara historis dan hukum alam, akan justru memunculkan regenerasi untuk melawan ketidak-makmuran.⁸⁰

Di sinilah santri baru ditentukan oleh kelompok-kelompok kecil, bahkan dalam tingkat tertentu awalnya hanya berasal dari sebuah obrolan-obrolan kecil. Kelompok-kelompok kecil ini akan

80 Maksud dari melawan ketidak-makmuran di sini adalah melawan ide-ide yang dikeluarkan oleh para santri koler atau tua, ketika mereka lembek, dan sudah menjadi hukum alam bahwa hal itu akan memunculkan generasi yang baru.

terus membesar, bila ide dan sikapnya mampu menjadi pilihan publik. Santri baru tersebut akan dikelola menjadi besar oleh masing-masing kelompoknya, baik dari sisi konseptualisasi politiknya maupun gerakan politik praktisnya.

Makna dari kelompok-kelompok kecil yang dikelola santri adalah kelompok santri yang pada awalnya tidak pernah diperhitungkan, kemudian diperdebatkan, diperbincangkan dan akhirnya dipandang sebagai wacana karena ternyata mereka mampu menjadi penyambung dari dunia dan masyarakat sekitarnya. Mereka yang berani bertahan dalam kelompok-kelompok kecil, untuk kemudian menjadi besar, dengan resiko dimaki-maki oleh santri tua dan resiko dari pertarungan di antara santri muda sendiri, maka ia yang akan menjadi penggerak (*king maker*) sejarah dan menentukan arah berjalannya perubahan di kalangan santri di kemudian hari.

Dari sini, memang harapan kepada kaum santri muda bukanlah suatu yang mengada-ada. Karena merekalah yang relatif dapat melihat tanda-tanda zamannya daripada santri tua, di samping faktor energi/staminanya yang masih cukup tangguh dibanding dengan kaum santri tua. Untuk itulah, nasib pergumulan politik Islam Indonesia akan ditentukan oleh kelompok-kelompok kecil yang pada akhirnya akan terus membesar di komunitasnya masing-masing.⁸¹

Konflik internal di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ternyata belum berakhir. Jika beberapa waktu yang lalu PKB diwarnai konflik internal antara kubu Muhaimin Iskandar (Cak Imin)-Abdurrahman Wahid (Gus Dur) versus kubu Choirul Anam (Cak Anam), maka saat ini konflik internal PKB melibatkan kubu Cak Imin versus Gus Dur. Cak Imin dituduh berwajah ganda dan berkepentingan untuk menjatuhkan Gus Dur. Karena alasan itulah, Gus Dur mengancam akan menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa

81 Nur Khalik Ridwan, *Santri Baru*, hlm. 7-8.

untuk mengakhiri karir politik Cak Imin sebagai Ketua Umum DPP PKB.⁸²

Makna yang dapat ditarik dari fenomena di atas adalah bahwa sampai kini sesama anak-anak ideologis Hasyim Asy'ari, bisa disebut kaum sarungan, masih disibukkan dengan konflik internal. Kaum sarungan sendiri sudah terlalu kaya dengan sejarah konflik. Seperti yang diakui M. Ali Haidar di buku *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia* (1998), perjalanan politik kaum sarungan selalu saja terbentur konflik yang tidak jarang *sad ending*. Setiap masa dan setiap generasi, sering konflik tidak terhindarkan. Padahal, konflik semacam itu cenderung melelahkan dan melupakan kepentingan kepartaian dan kebangsaan.

Karena itulah, sejak saat ini kaum sarungan harus pandai meminimalisir konflik. Sejarah masa lalu jangan dijadikan justifikasi untuk berkonflik. Yang relevan dilakukan elite-elite kaum sarungan bukanlah larut dalam konflik internal, tetapi segera melakukan konsolidasi partai demi terwujudnya kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konflik internal elite-elite PKB harus segera diakhiri dan selanjutnya mereka harus fokus mewujudkan cita-cita agung para konstituennya. Salah satu caranya ialah dengan merealisasikan gagasan PKB sebagai "partai advokasi" yang sempat terbengkalai.

Dari konteks filosofi politik, menjadi partai advokasi merupakan manifestasi komitmen PKB sebagaimana telah terumuskan dalam platform partai ini, terutama menyangkut keberadaan konstituen partai politik yang sebagian besar relatif terpinggirkan (terabaikan) akibat kebijakan salah urus dan salah fokus yang terjadi selama ini. Rakyat Indonesia, lebih-lebih konstituen PKB, harus selalu diberdayakan dan diangkat prestasi hidupnya. Bukan hanya diambil "suaranya" dalam pesta demokrasi lima tahunan.

82 Syaiful Bari "Konflik di Parpol Kaum Sarungan" dalam *Suara Merdeka*, 1 Agustus 2007.

Advokasi oleh PKB adalah komitmen untuk melakukan politik sebagai aktivitas harian (bukan kegiatan lima tahunan) dan politik sebagai panggilan hidup (bukan sebagai profesi-pragmatis) guna mengangkat nasib rakyat atau kaum Bumiputera. Advokasi yang demikian menjadi salah satu upaya membenahi kerapuhan struktural dan menumbuhkan mentalitas kewarganegaraan (*civil mentality*), sehingga partai politik tidak lagi terjebak pada pragmatisme sempit.

Melalui buku *Melampaui Demokrasi* (2006), Muhaimin Iskandar menuturkan bahwa advokasi juga bisa menjadi momentum untuk mengembalikan peran ulama di tengah kehidupan masyarakat dan rakyat banyak, di mana salah satu sumber opini hukum (legal opinion) yang menjadi ciri khas PKB adalah fatwa para ulama. Dengan seperti ini, hubungan historis, kultural, dan aspiratif antara NU dan PKB bisa berjalan berdampingan dan saling melengkapi.

Peran Ulama

Sudah diketahui, PKB didirikan oleh para ulama di lingkungan organisasi NU sebagai alat/sarana perjuangan dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial di negeri yang katanya kaya raya ini. Sampai sekarang, keterlibatan ulama atau kiai masih diperlukan di partai berlambang bintang sembilan itu. Seperti yang dielaborasi Muhaimin Iskandar, setidaknya ada tiga alasan untuk menjawab kenapa para ulama dibutuhkan dalam proses politik, khususnya di PKB.

Pertama, keterlibatan ulama dalam perubahan politik dan ekonomi menjadi urgen untuk mentransendensikan hal-hal yang bersifat praktis, sehingga proses perubahan memiliki dimensi etis dan spiritual yang dapat mendorong pelaku politik untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhannya. Tanpa dua dimensi tersebut, politik tidak akan bermakna penting. Politik hanya akan berkiblat pada teori Nicollo Machiavelli yang menghalalkan secara cara. Berlakulah apa

yang disebut dengan homo homini lupus. Padahal idealnya, merujuk pada Drijarkara, harus homo homini socius.

Kedua, di antara tugas keulamaan yang mendasar adalah menjadikan agama sebagai pijakan dalam transformasi sosial dan perekat bagi kohesi sosial di masyarakat yang majemuk (pluralis). Agama bukanlah "setan" penyebar konflik dan disintegrasi sosial, melainkan dapat menjadi perekat sosial dan merujuk pada Max Weber (1864-1920), agama sebagai energi perubahan spektakuler dalam sejarah hidup manusia. Karena itu, ulama sendiri selalu dituntut untuk mensosialisasikan bahwa kehadiran agama adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan perusak tatanan kemanan.

Ketiga, dakwah ulama di tengah masyarakat adalah dakwah kebudayaan, dalam arti selalu menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan ajaran Islam. Dengan cara itu diharapkan proses-proses politik dan pembangunan sosial bisa berjalan seiring dengan transformasi kultural masyarakat. Kalau ulama mampu menjalankan tugas-tugas fundamentalnya, maka citra negatif bahwa mereka hanyalah pembuat "onar" yang mendorong konflik bisa tereliminasi.

Menyelesaikan Konflik

Selanjutnya, untuk keluar dari konflik internal yang terus melanda parpol kaum sarungan, saya akan meminjam teori etika diskursus Jurgen Habermas. Etika diskursus Habermas dibutuhkan mengingat dalam etika diskursus setiap orang yang berkonflik diharuskan untuk duduk sejajar mencari jalan kesepakatan (konsensus). Artinya, dalam rangka menyelesaikan konflik internal di tubuh PKB tersebut dibutuhkan komunikasi terus menerus di mana masing-masing pihak sama-sama memperjuangkan kepentingan bersama.

Sebagaimana dituturkan Habermas dalam mahakaryanya, *The Theory of Communicative Action Vol. I: Reason and the Rationalization of Society* (1984) dan *The Theory of Communicative Action Vol II: Lifeworld and System* (1989), tujuan komunikasi adalah saling pengertian. Habermas mengungkapkan bahwa dalam komunikasi, situasi subyek-obyek bisa dihindarkan. Sebab, komunikasi mengandaikan dua hal. Pertama, manusia berhadapan satu sama lain sebagai dua pihak yang sejajar dan berdaulat. Kedua, adanya ruang kebebasan dalam menangkap maksud orang dalam suatu komunikasi yang tidak dipaksakan.

Persoalannya, selama ini PKB terlalu tergantung pada figur sentral Abdurrahman Wahid yang seakan-akan menjadi patron utama. Padahal, hal itu hanya akan menghambat proses-proses penyelesaian konflik karena yang muncul bukanlah kesetaraan hubungan, melainkan adanya hierarki. Karena itu, untuk menyelesaikan konflik internal yang sampai saat ini masih mewarnai PKB, masing-masing pihak harus sama-sama menghargai dan tidak memosisikan diri dan kelompoknya di atas yang lain. Jika demikian, jalan kebersamaan akan mudah diraih.[]